

AKSI UNILATERAL (TINDAKAN SEPIHAK) NEGARA MAJU DAN IMPLIKASINYA BAGI KEPENTINGAN NASIONAL INDONESIA

F.X. Joko Priyono*

Abstract

The tendency to the emergence of state unilateral action happened in parallel with the age of international law itself. The traditional international law resists the unilateral action of state badly because it is inconsistent with state sovereignty. Unilateral action has been practiced by states, notably by developed states in order to get justification related with human rights, democracy and environment all of which has already been adopted in the General Agreement on Tariff and Trade/World Trade Organization (WTO). The tendency may reflect arbitrary of state even tend to create new international law (law making) if the act is adopted and become customary. Developing countries, including Indonesia, needs to anticipate it by reducing dependence on developed countries, improvement of political atmosphere, economic and human rights and doing diplomatic approach by ASEAN organization.

Kata Kunci : *Tindakan Sepihak, Hukum Internasional Baru (Law Making), Kepentingan Nasional*

Dalam dunia internasional, negara sering melakukan tindakan sepihak (unilateral acts) dengan maksud untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Signifikansi tindakan unilateral tersebut terus berkembang sebagai akibat dari perubahan politik, ekonomi dan teknologi yang terjadi dalam masyarakat internasional pada saat sekarang ini, khususnya kemajuan sarana untuk mengekspresikan perilaku dan tindakan negara. Di samping itu, praktek negara dalam kaitannya dengan tindakan unilateral yang diwujudkan dalam berbagai bentuk dan kondisi telah menjadi pokok bahasan studi dan telah menjadi pertimbangan dalam putusan di Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*)¹.

Dalam sejarah perkembangan hukum internasional, tindakan sepihak sebuah negara telah lama terjadi terutama berkaitan dengan masalah perang. Sejarah peperangan di dunia

sebagian besar diawali dengan tindakan sepihak negara yang berupa agresi sewaktu Perang Dunia I. walaupun ada ketentuan dalam hukum kebiasaan perang bahwa negara yang akan menjalankan perang diwajibkan untuk mendeklarasikan (*declaration of war*) namun tindakan sepihak negara masih saja terus terjadi.

Kasus-kasus tindakan sepihak dapat pula kita jumpai pada era dua dekade. Kasus Nikaragua melawan AS atas penggunaan kekerasan terhadap Nikaragua pada tahun 1984. Dalam kasus ini Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*) memenangkan Nikaragua. Putusan ini langsung direspon oleh AS dengan menyatakan bahwa sebagai negara berdaulat ia tidak harus mengakui putusan Mahkamah Internasional. Arogansi AS ini juga terjadi pada waktu mengambil presiden Panama Jenderal Noriega dengan alasan Panama telah

* F.X. Joko Priyono adalah Dosen Bagian Hukum Internasional UNDIP Jl. Imam Bardjo, SH. No. 1, Semarang.

1 *Nuclear Tests Case (Australia v. Perancis; Selandia Baru v. Perancis)*, Putusan 20 Desember 1974, ICJ Reports 1974.

dijadikan sebagai tempat pelarian dan berlindung para bandar narkoba².

Peta politik internasional telah mengalami perubahan yang begitu besar sejak berakhirnya perang dingin dan hancurnya bekas negara Uni Soviet. Kondisi tersebut menimbulkan kekuatan baru AS sebagai satu-satunya negara "super power" di dunia. Perubahan tersebut juga diwarnai dengan adanya globalisasi yang begitu cepat, serangan terorisme dalam skala besar terutama sejak kasus 11 September 2001. Terciptanya perdamaian dan keamanan dunia pasca perang dingin masih menjadi tantangan dan belum bisa terwujud sejak didirikannya PBB setelah perang dunia II. Dari beberapa peristiwa di dunia, Perang Irak merupakan isu yang terkini yang mempertanyakan keberadaan ketentuan-ketentuan hukum internasional yang ada khususnya ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Piagam PBB yang dimaksudkan untuk memelihara perdamaian dan keamanan dunia yang sedang berubah.

Ketidakmampuan PBB untuk bereaksi secara cepat untuk memecahkan persoalan-persoalan internasional telah menyebabkan dilakukannya intervensi oleh AS dan negara-negara lainnya tanpa melalui persetujuan PBB. Intervensi demikian dapat dikatakan sebagai intervensi sepihak (*unilateral action*). Reaksi internasional terhadap intervensi unilateral ini beraneka ragam dari kasus per kasus. Di satu pihak, banyak negara lebih setuju bila intervensi unilateral tersebut dilakukan dalam bentuk keterlibatan PBB dalam penyelesaian sengketa internasional yang diwujudkan melalui persetujuan Dewan Keamanan PBB seperti legislasi intervensi militer NATO (*North Atlantic*

Treaty Organisation). Di lain pihak, ada beberapa reaksi di mana AS telah bertindak atau seharusnya bertindak di luar kerangka PBB. Satu contoh adalah intervensi militer di Afganistan. Meskipun dunia sepakat untuk menindak tegas teroris atas serangan 11 September 2001 oleh al-Qaeda, legalitas serangan AS ke Afganistan dipertanyakan berkaitan dengan prinsip-prinsip hukum internasional.

AS dan negara lainnya juga telah mengembangkan sebuah asas *pre-emptive strike*. Asas ini digunakan sebagai cara untuk melawan teror. Dalam Pasal 51³ Piagam PBB dikatakan suatu negara dapat menggunakan hak beladiri (*right of self defence*) apabila negara tersebut mendapat ancaman serangan yang sudah di depan mata (*imminent attack*). Hak membela diri umumnya dilakukan pada saat sebuah negara mendapat serangan, sehingga serangan harus sudah terjadi. Dalam *pre-emptive strike*, pihak yang merasa terancam melakukan serangan terlebih dahulu terhadap pihak yang dianggapnya mengancam. Pengemboman AS terhadap Libya pada tahun 1986 merupakan contoh lain selain kasus serupa yaitu serangan Israel atas Irak atas reaktor nuklirnya.

Di bidang perdagangan internasional, tindakan sepihak negara juga sering terjadi terutama berkaitan dengan standarisasi produk, regulasi teknis (*technical regulation*) dan sertifikasi. Dalam hal produk suatu negara tidak memenuhi standard nasional suatu negara, negara yang mengenakan standard tersebut biasanya secara unilateral melakukan penolakan atau mengembargo produk yang

2 Hikmahanto Juwana, Hukum Internasional Dalam Perspektif Negara Sedang Berkembang, Pengembangan Bahan Ajar Hukum Internasional, Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 6-8 Juni 2006.

3 Pasal 51 Piagam PBB:

"Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or collective self-defence if an armed attack occurs against a Member of the United Nations, until the Security Council has taken measures necessary to maintain international peace and security. Measures taken by Members in the exercise of this right of self-defence shall be immediately reported to the Security Council and shall not in any way affect the authority and responsibility of the Security Council under the present Charter to take at any time such action as it deems necessary in order to maintain or restore international peace and security."

bersangkutan. Tidak ada secara khusus perjanjian internasional yang mengatur tentang standard produk. Dalam *Agreement on Technical Barrier to Trade* (GATT/WTO) dikatakan bahwa penerapan standard produk suatu negara tidak boleh menghambat perdagangan. Rumusan ini memang masih sumir karena sulit untuk diukur. Dalam GATT sendiri membolehkan suatu negara melakukan tindakan sepihak seperti embargo terutama dikaitkan dengan perlindungan manusia, hewan, tanaman dan lingkungan hidup serta keamanan nasional suatu negara.

Dari tindakan-tindakan unilateral yang hampir sebagian besar dilakukan oleh negara-negara maju menunjukkan kecenderungan (*trend*) untuk memperoleh justifikasi bahkan legitimasi oleh masyarakat internasional dengan bingkai perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi serta pemberantasan terhadap kejahatan terorisme.

Kecenderungan semacam itu memang akan sangat merugikan negara sedang berkembang termasuk Indonesia karena ada ketergantungan mereka terutama sisi kepentingan ekonomi. Posisi tawar NSB memang sangat rendah sehingga ketika pemerintah AS menawarkan sebuah perjanjian *Non-Surrender Agreement* kepada mereka, NSB berada pada posisi sulit untuk menolak. *Non-Surrender Agreement* adalah perjanjian bilateral yang diinisiatifkan oleh AS sebagai tindakan antisipatif untuk mencegah sebuah negara mengirim warganegara AS ke *International Criminal Court* atau Mahkamah Pidana Internasional. Apa yang terjadi bila Indonesia menandatangani NSA dengan AS? kosekuensi hukumnya adalah Indonesia harus menolak permintaan

Mahkamah Pidana Internasional bila ada warganegara atau personil militer AS yang sedang berada di Indonesia diminta untuk diserahkan ke Mahkamah Pidana Internasional. Hal ini dimungkinkan karena dalam Pasal Statuta Roma 1998 terutama Pasal 98⁴ dinyatakan bahwa bila terdapat perjanjian yang mensyaratkan adanya ijin dari negara kewarganegaraan pelaku maka pelaku tidak harus diserahkan ke Mahkamah Pidana Internasional bila ijin tidak diperoleh.⁵

Tekanan-tekanan yang diberikan oleh negara-negara maju terutama AS akan memberikan dampak yang begitu luas, tidak hanya di bidang ekonomi dan politik tetapi berdampak pula pada produk perundangan yang banyak memberikan keuntungan bagi para pelaku usaha asing. Produk hukum yang bersifat komersial di Indonesia memang lebih banyak mencerminkan kepentingan kaum kapitalis asing daripada kepentingan masyarakat Indonesia. Desakan globalisasi perdagangan menyebabkan pemerintah melakukan penyesuaian-penyesuaian (*adjustments*) peraturan perundangan. Ancaman-ancaman dalam bingkai perbaikan HAM dan demokrasi berimplikasi pula pada sektor perdagangan. Masih ingat dalam ingatan kita ketika AS mendesak pemerintah Indonesia untuk menaikkan upah buruh sesuai standarisasi ILO dengan ancaman akan mencabut semua fasilitas perdagangan Indonesia bila tidak melaksanakannya membuat pemerintah tidak berdaya. Pada akhirnya semua permasalahan yang muncul berkaitan dengan tindakan sepihak tersebut berakar pada keadilan struktural masyarakat internasional.

4 Pasal 98 Statuta Roma 1998:

1. The Court may not proceed with a request for surrender or assistance which would require the requested State to act inconsistently with its obligations under international law with respect to the State or diplomatic immunity of a person or property of a third State, unless the Court can first obtain the cooperation of that third State for the waiver of the immunity.
2. The Court may not proceed with a request for surrender which would require the requested State to act inconsistently with its obligations under international agreements pursuant to which the consent of a sending State is required to surrender a person of that State to the Court, unless the Court can first obtain the cooperation of the sending State for the giving of consent for the surrender.

5 Hikmahanto Juwana, Op.cit.

Pengertian dan Basis Teori Tentang Tindakan Unilateral

Tindakan sepihak negara memang tidak ada sumber hukumnya karena berasal dari negara itu sendiri sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat. Namun demikian, tindakan sepihak ini dapat dan sering memberikan pengaruh terhadap sumber hukum. Tindakan sepihak dalam prakteknya bisa merupakan awal munculnya hukum kebiasaan internasional sementara untuk menjadi sebuah perjanjian internasional membutuhkan sejumlah tindakan negara yang terus menerus dan konsisten. Namun ini tidaklah berarti bahwa setiap negara dapat menciptakan hukum internasional melalui tindakan-tindakan sepihak. Memang, sebagian dari tindakan sepihak ini dapat melahirkan hak, kewajiban dan hubungan hukum.

Tidak ada rumusan atau definisi yang bisa ditemukan dalam sumber hukum internasional karena memang pada dasarnya tindakan unilateral dalam hubungan antar negara tidak diperbolehkan. Namun demikian dalam hukum perjanjian internasional, pengertian tindakan sepihak ini bisa ditemukan dalam klausula pengunduran diri atau pembatalan sepihak terhadap perjanjian internasional yang dikenal dengan sebutan *denunciation*.

Dalam *Second Report on Unilateral Acts of States* yang dibuat oleh International Law Commission, Unilateral Acts of States diberikan pengertian sbb⁶:

"... unilateral legal act means an unequivocal, autonomous expression of will, formulated publicly by one or more states in relation to one or more other states, the international community as a whole or an international organization, with the intention of acquiring international legal obligations."

Dalam pengertian tersebut digunakan istilah *unilateral legal act* yang maksudnya adalah "*unilateral declaration*" yang merupakan sebuah pernyataan kehendak yang independen dan dibuat oleh satu atau lebih negara yang berhubungan dengan satu atau lebih negara, masyarakat internasional secara keseluruhan atau sebuah organisasi internasional, dengan maksud untuk menimbulkan kewajiban hukum internasional.

Pengertian ini menjadi jelas karena pernyataan kehendak tersebut hanya mencakup kewajiban bagi negara atau negara yang membuatnya karena memang sebuah negara tidak dapat memaksakan kewajiban kepada negara lain tanpa ada persetujuan (*consent*). Dalam hukum internasional dikenal dengan asas *pacta tertius nec nocent nec prosunt*.⁷

Pengertian tindakan unilateral menurut Piagam PBB disamakan dengan intervensi seperti yang tertuang dalam Pasal 2 Ayat 7 Piagam PBB:

"Nothing contained in the present Charter shall authorize the United Nations to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any state or shall require the members to submit such matters to settlement under the present charter; but this principle shall not prejudice the application of enforcement measures under Chapter VII."

Pasal 2 ayat 7 Piagam hanya mengatur intervensi melalui PBB bukan melalui negara. Dewan Keamanan dapat bertindak bila ada ancaman terhadap perdamaian dan agresi. Berdasarkan kondisi tersebut, Dewan Keamanan dapat memutuskan untuk melakukan tindakan termasuk memutuskan baik secara penuh maupun sebagian hubungan ekonomi

⁶ *Second Report on Unilateral Acts of States, International Law Commission, General Assembly, 14 April 1999, Geneva 3 May - 23 July 1999.*

⁷ I Wayan Parthiana, 1990, *Pengantar Hukum Internasional*, Penerbit CV Mandar Maju, Bandung, hlm. 320-321.

dan komunikasi dan juga hubungan diplomatik. Bila tindakan ini dirasakan masih belum cukup, Dewan Keamanan dapat menggunakan kekuatan bersenjata (*armed forces*). Negara dapat menjalankan hak beladiri baik individu maupun kolektif (melalui Dewan Keamanan) bila memang ada serangan militer. Organisasi regional diperbolehkan untuk mengambil langkah yang tepat berkaitan dengan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan di wilayah yang bersangkutan sepanjang tindakan mereka sesuai dengan tujuan prinsi-prinsip PBB.

Seperti diketahui, bahwa dalam hukum internasional terdapat asas "*par in parem non habet imperium*" yang artinya suatu negara berdaulat tidak boleh menerapkan yurisdiksinya atas negara berdaulat yang lain, tetapi hanya boleh menerapkan yurisdiksinya atas badan-badan atau pribadi-pribadi yang kedudukannya lebih rendah daripada negara itu⁸.

Sebagai konsekuensi dari pembatasan tersebut maka negara-negara di dunia termasuk pula organisasi internasional, haruslah saling menghormati kedaulatan masing-masing. Saling penghormatan atas kedaulatan ini berlaku secara timbal balik atau yang disebut dengan asas *resiprositas*.

Tindakan sepihak ini bentuknya berbagai macam dan tujuannya juga berbeda. Banyaknya tindakan sepihak dengan berbagai caranya merupakan sebuah fenomena yang wajar dan alami dari sebuah entitas negara yang berdaulat. Meskipun pergerakannya sangat dibatasi oleh hukum internasional, negara-negara masih memiliki yurisdiksi dan kompetensi yang eksklusif di mana mereka dapat bertindak menurut kebijakan nasional mereka dan membuat keputusan yang memiliki pengaruh atau akibat dalam hubungannya dengan negara lain. Di satu sisi negara bebas untuk bertindak seperti yang dia harapkan, namun di sisi lain

beberapa ketentuan baik dalam hukum kebiasaan maupun hukum perjanjian memberikan tempat pada tindakan sepihak ini melalui berbagai proses hukum atau membolehkan tindakan sepihak dalam situasi yang berbeda-beda.

Dalam hukum internasional tradisional terutama dalam konteks kedaulatan (*sovereignty*), tindakan sepihak suatu negara dengan melakukan serangan terhadap negara lain adalah dilarang, kecuali dalam rangka *self-defence* (bela diri). Ketentuan tersebut didasarkan pada pengalaman pahit yang terjadi baik pada masa Perang Dunia I maupun Perang Dunia II agar tidak terulang lagi.

Dalam tatanan hukum internasional yang senantiasa mengagungkan kedaulatan negara, intervensi satu negara dalam urusan dalam negeri negara lain selalu akan menimbulkan konflik. Pandangan tradisional yang mengatakan bahwa semua jenis campur tangan ke dalam urusan dalam negeri negara lain dianggap bertentangan dengan hukum internasional ini telah mengalami penekanan-penekanan yang semakin meningkat dengan semakin munculnya tindakan-tindakan proaktif yang bersifat sepihak yang dalam keadaan-keadaan tertentu memperoleh legitimasi. Alasan-alasan demi menjaga perdamaian, hak asasi manusia dan demokrasi merupakan dasar justifikasi tindakan intervensi tersebut di atas.

Di dalam Piagam PBB sudah jelas ada kewajiban dasar negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain, yakni (a) kewajiban untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang bersifat melanggar supremasi kedaulatan negara lain; (b) kewajiban untuk tidak melanggar supremasi teritorial negara lain; (c) kewajiban untuk melakukan intervensi atas masalah dalam negeri negara lain. Di samping Piagam PBB kewajiban-kewajiban internasional bagi negara

8 Ibid.

juga ditegaskan dalam *Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation among States*. Ada tujuh prinsip sebagai guidelines dalam hubungan internasional, yang meliputi:

1. *that States shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any State;*
2. *that states shall settle their international disputes by a peaceful means in such manner that international peace and security and justice are not endangered;*
3. *that it is a duty not to intervene in such matters within the domestic jurisdiction of any State, in accordance with the Charter;*
4. *that States are under a duty to co-operate with one another in accordance with the Charter;*
5. *the principle of equal rights and self-determination of peoples;*
6. *the principle of sovereign equality of States; and*
7. *States shall fulfil in good faith the obligations assumed by them in accordance with the Charter.*

Keberadaan kewajiban-kewajiban internasional seperti di muka pada saat sekarang ini, di mana persoalan-persoalan yang terjadi baik dalam negeri sendiri maupun dalam masyarakat internasional secara luas telah mengalami perkembangan yang sangat luar biasa dan juga bertambahnya pelaku-pelaku Hukum Internasional (seperti organisasi internasional, individu dan lain-lain), telah mengalami pergeseran dari konsep awal. Pergeseran signifikan dari kewajiban negara dapat dicontohkan dalam masalah HAM yang

dewasa ini sudah sedemikian mendunia. Persoalan HAM dalam suatu negara tidak lagi dapat dikatakan sebagai semata-mata persoalan negeri yang bersangkutan. Penghormatan terhadap HAM telah menjadi kewajiban bagi negara untuk menegakkannya, bahkan apabila perlu dapat dilakukan dengan melampaui batas kedaulatan teritorial suatu negara. Di masa sekarang tindakan semacam itu tidak dapat dikatakan semata-mata sebagai bentuk intervensi asing pada urusan dalam negeri suatu negara.

Ketentuan-ketentuan dalam Piagam PBB yang sebagian kalangan dianggap sebagai hukum internasional tradisional dalam perkembangannya ternyata oleh beberapa negara maju dianggap sudah tidak mampu mengatasi perdamaian internasional karena perkembangan di bidang teknologi informasi dan globalisasi telah menggeser isu-isu tradisional. Isu-isu HAM dan demokrasi telah dijadikan alasan beberapa negara untuk melakukan intervensi tanpa melalui PBB. Tindakan-tindakan tersebut telah dicoba untuk dilakukan pembenaran-pembenaran seperti yang tercermin dalam pemikiran Imanuel Kant dan Teson.

Dalam konsepsi Kant, pentaatan terhadap hukum internasional didasarkan pada "*general will*" (kemauan bersama). Menurutinya, kemauan bersama ini mengganti keputusan unilateral negara. Makna "*general will*" adalah untuk meniadakan tindakan unilateral negara dan harus dikembalikan pada fungsi lembaga-lembaga hukum internasional dalam rangka mencapai sebuah keputusan yang adil, bukan keputusan yang ditentukan oleh tindakan atau ancaman tindakan oleh negara⁹.

Berbeda halnya dengan konsep pemikiran

⁹ Uraian tentang filosofi Kant ini dapat dilihat Hari Chand, 1994, *Modern Jurisprudence*, International Law Book Services, Kuala Lumpur, hal. 47-a. Theo Huijbers, 1982, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Pustaka Filsafat, Yogyakarta, hal. 94-102.

Teson. Dalam pandangannya, Teson¹⁰ berpendapat bahwa prinsip-prinsip hukum internasional yang konvensional seperti konsep kedaulatan negara misalnya non-intervensi dan tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain adalah salah baik secara moral maupun secara konseptual. Namun sebaliknya, berdasarkan tesis Imanuel Kant, konsep kedaulatan yang "*morally loaded*" ini secara normatif dibenarkan Kant. Teson berpendapat bahwa kebebasan pemerintah tidak hanya menjalankan kekuasaan baik internal maupun eksternal tetapi kebebasan pemerintah itu akan menjadi sesuatu yang baik bila kebebasan individu diberikan tempat yang layak dan semua pelaksanaan kekuasaan politik dijalankan dengan sarana moralitas politik (*tools of political morality*). Bagi negara yang menjalankan kebebasan pemerintah yang sewenang-wenang dan tidak menghormati HAM dan hak-hak demokratis maka tidaklah salah bila warganegara dari negara yang bersangkutan melakukan pemberontakan karena pemerintahnya dianggap tidak adil (*unjust government*) dan bagi pemerintah yang menghormati HAM dan hak-hak demokratis dapat menjalankan self-defence dan dapat melakukan intervensi ke dalam urusan dalam negeri sebuah negara yang pemerintahannya menolak hak-hak demokratis warganegaranya. Dengan demikian jelas bahwa Teson telah memberikan pembenaran (justifikasi) terhadap tindakan intervensi pada suatu negara yang melakukan pelanggaran HAM dan hak-hak demokratis. Pembenaran dapat dilakukan dengan dua alasan : justifikasi ini berlaku pada

"potential intervenor" yang pemerintahannya adil dan *legitimate*. Pemerintah yang *legitimate* adalah pemerintahan yang menghormati HAM dan hak-hak demokratis. Kant berpendapat bahwa menentukan adil dan tidak adil adalah sangat sulit dan merupakan *unilateral judgment* (keputusan sepihak). Selanjutnya dikatakan Teson, setiap negara memiliki tiga kewajiban yaitu: 1) mempertahankan diri (*self-defence*); 2) menghormati hak-hak semua orang baik di dalam negeri maupun di luar negeri; 3) melindungi dan memperluas HAM dan hak-hak demokratis secara global. Poin 2 dan 3 ini dapat dijadikan alasan untuk melakukan intervensi jika sebuah pemerintahan negara yang adil menganggap bahwa HAM dan hak-hak demokratis dilanggar di luar negeri.

Intervensi yang bersifat unilateral yang dilakukan oleh negara untuk tujuan kemanusiaan jelas didukung oleh Teson. Menurut Kant, keputusan dan tindakan unilateral oleh negara adalah *illegal*. Oleh karena itu justifikasi Teson atas tindakan unilateral ini bertentangan dengan tesis Kant. Dengan demikian legalitas intervensi kemanusiaan unilateral perlu dikaji lebih dalam.

Dalam sejarah perkembangan hukum internasional, tindakan unilateralisme tidak selamanya tidak menciptakan hukum, walaupun secara umum ditentang oleh masyarakat internasional. Di bidang hukum laut misalnya, ketentuan-ketentuan hukum laut yang telah diteguhkan dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut Tahun 1982 (UNCLOS) sebagian besar diawali dengan klaim-klaim atau tindakan sepihak atas wilayah laut dan sumber kekayaan

10 Dalam bukunya yang berjudul *A Philosophy of International Law*, Teson mengacu pada apa yang dikembangkan oleh Imanuel Kant yang menyatakan bahwa ada hubungan antara hukum internasional dengan keadilan domestik (*domestic justice*). Menurut Teson, *domestic justice* berarti penghormatan terhadap hak asasi manusia dan hak-hak demokratis yang merupakan prinsip moral yang universal (bersifat imperatif). Sifat imperatif prinsip moral yang universal (penghormatan HAM dan hak-hak demokratis) artinya lebih mengutamakan kewajiban daripada hak. Oleh karena itu, diperlukan adanya hubungan antara yang bersifat imperatif tersebut dengan HAM. Dalam debat tentang filosofi hukum Kant terdapat kontroversi tentang hal ini. Contoh, Hoffe menyatakan bahwa aplikasi dari imperatif kategorial dalam sebuah tata hukum menekankan pada pembatasan prosedural pada negara daripada menekankan pada HAM individu. Mungkin dengan menggunakan lisensi imperatif ini suatu hubungan antara imperatif kategorial dan HAM dapat digambarkan. Teson juga mengatakan bahwa HAM positif (hak yang diberikan untuk bantuan kemanusiaan) berasal dari imperatif ini.

alam di dalamnya seperti lebar laut wilayah, landas kontinen (*continental shelf*) dan ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif). Faktor-faktor penyebabnya adalah perubahan petabumi politik, kemajuan teknologi, bergantungnya bangsa-bangsa pada laut sebagai sumber kekayaan alam, baik kekayaan hayati (*living resources*) maupun kekayaan mineral termasuk minyak bumi dan gas¹¹.

Diantara peristiwa atau tindakan sepihak yang merupakan kejadian-kejadian yang cukup penting dalam sejarah perkembangan hukum laut adalah:

1. Proklamasi Truman Tahun 1945 tentang "*Continental Shelf*" (landas kontinen) dan Perikanan
2. Sengketa Perikanan antara Inggris dan Norwegia yang menjadi perkara di hadapan Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*) dan dikenal dengan perkara perikanan Inggris dan Norwegia tahun 1951 (*Anglo Norwegian Fisheries Case*)¹²
3. Klaim-klaim yang diajukan oleh beberapa negara Amerika Selatan berkaitan dengan jalur 200 mil

Aksi Unilateral Dalam Perdagangan Internasional

Dalam perdagangan internasional yang diatur dalam GATT/WTO, dikenal beberapa tindakan unilateral baik yang legal maupun yang semi legal artinya sesungguhnya tidak diperbolehkan namun dalam praktek diberikan toleransi dengan catatan tidak boleh menghambat perdagangan karena sesungguhnya dalam GATT dikenal sebuah

prinsip "protection through tariff" (perlindungan melalui tarif). Prinsip ini pada dasarnya merefleksikan bahwa masalah tarif berkaitan dengan masalah transparansi. Oleh karena itu tarif dianggap transparan dan rasional maka GATT 1994 hanya mengizinkan sebuah negara untuk melakukan proteksi melalui tarif dan tidak dengan langkah-langkah yang menciptakan proteksi non-tarif (*non-tariff barriers*). Tarif dijadikan sebagai alat proteksi karena tarif dianggap masih dalam kerangka mekanisme harga yang merupakan komponen penting dalam ekonomi pasar. Namun demikian, terdapat pengecualian prinsip perlindungan melalui tarif ini, yaitu:¹³

1. Artikel XI ayat 2 : artikel ini mengizinkan sebuah negara anggota WTO menggunakan *quantitative restrictions* untuk produk-produk perikanan dan pertanian dalam menstabilkan pasar domestik
2. Artikel XII dan XVIII section b : dalam rangka untuk mengamankan neraca pembayaran (*balance of payment*), sebuah negara dapat mengambil langkah perlindungan non-tarif seperti membatasi impor dari barang-barang tertentu yang dianggap dapat sangat mempengaruhi posisi neraca pembayaran
3. Artikel XVII section c : artikel ini memberikan kesempatan bagi negara sedang berkembang untuk menggunakan *quantitative restriction* untuk melindungi *infant industry* (industri bayi) dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Langkah ini hanya diperkenankan bila tarif tidak mampu memproteksi industri bayi tersebut.

11 Mochtar Kusumaatmadja, 1983, *Hukum Laut Internasional*, Binacipta, Bandung, hal. 81.

12 Kasus Anglo Norwegian Fisheries Case 1951 diawali dengan tindakan sepihak Norwegia melalui Keputusan Raja (Royal Decree) tahun 1935 yang menetapkan batas-batas perairan perikanan Norwegia yang tertutup bagi nelayan asing dengan alasan hak-hak kesejarahan (*historical rights*) dan keadaan geografis khusus pantai Norwegia dengan tujuan untuk melindungi dan mengamankan kepentingan vital penduduk bagian utara Norwegia. Dalam kaitan ini, Norwegia menggunakan cara penarikan garis pangkal lurus (*straight base lines*) yang menghubungkan titik-titik terluar pada pantai Norwegia. Dalam putusannya hakim Mahkamah Internasional menyatakan bahwa cara penetapan jalur perikanan sebagaimana dilakukan dalam Keputusan Raja tidak bertentangan dengan hukum internasional.

13 Bernard Hoekman, Pierre Sauve, *Liberalizing Trade in Services*, The World Bank, Washington DC.

Pelaksanaan penerapan tarif terhadap barang impor harus memenuhi persyaratan yaitu : a) besarnya tidak boleh melebihi bound rate (komitmen suatu negara anggota WTO untuk mengikat tarif tertinggi), untuk suatu produk pada tingkat tertentu); b) tarif tersebut diberlakukan tanpa diskriminasi atau sesuai prinsip MFN. Ini berarti barang impor yang sejenis (*like product*) yang berasal dari semua negara anggota WTO dikenakan tarif yang sama.

Tindakan unilateral yang diakui dalam GATT/WTO terdapat dalam Artikel XX dan XXI. Kedua artikel ini disebut sebagai technical regulation. Artikel XX menyatakan:¹⁴

"Subject to the requirement that such measures are not applied in a manner which would constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination between countries where the same conditions prevail, or a disguised restriction on international trade, nothing in this agreement shall be construed to prevent the adoption or enforcement by any contracting party of measures:

- (a) *necessary to protect public morals*
- (b) *necessary to protect human, animal, plant life or health*
- (c) *relating to the importation or exportation of gold or silver*
- (d) *necessary to secure compliance with laws or regulations which are not inconsistent with the provisions of this Agreement, including those relating to customs enforcement, the enforcement of monopolies operated under paragraph 4 of Article II and Article XVII, the protection of patents, trade marks and copyrights, and the prevention of deceptive practices*
- (e) *relating to the products of labour*

- (f) *imposed for the protection of national treasures of artistic, historic or archaeological value*
- (g) *relating to the conservation of exhaustible natural resources if such measures are made effective in conjunction with restrictions on domestic production or consumption*

Artikel XX ini menyangkut pembatasan-pembatasan dalam kaitan dengan (a) moral publik (*necessary to protect public morals*), (b) perlindungan kehidupan manusia, hewan, tanaman atau kesehatan, (c) perdagangan emas dan perak, (d) perlindungan paten, merek dagang, hak cipta, dan pencegahan praktek-praktek yang menyesatkan, (e) produk buruh tahanan, (f) perlindungan kekayaan nasional yang berkaitan dengan nilai seni, historis dan kepurbakalaan dan (g) yang berkaitan dengan konservasi sumber daya alam.

Tindakan sepihak dalam rangka Artikel XX dibolehkan asalkan tidak diskriminatif dan tidak merupakan paraktek terselubung. Apabila unsur-unsur dalam Artikel XX ini terpenuhi maka negara memiliki hak untuk membolehkan sebuah negara bilamana memang dianggap perlu (*necessary*) untuk melakukan tindakan sepihak untuk mengembargo produk asing yang dapat berakibat pada rusaknya moral publik, menurunnya kualitas hidup manusia, hewan dan lingkungan serta yang lainnya yang dicakup dalam Artikel XX. Tindakan ini dapat dilakukan tanpa konsultasi atau persetujuan dari negara yang terkena. Namun demikian, tindakan embargo suatu negara atas produk asing yang dapat membahayakan dalam rangka Artikel XX ini harus didasarkan pada peraturan atau undang-undang nasional suatu negara.

Kasus yang populer adalah *Tuna/Dolphin Case*¹⁵ antara Amerika Serikat melawan Meksiko. Kasus ini berawal dari adanya US

14 Uruguay Round of Multilateral Trade Agreements (Marrakesh Agreement) 1994.

15 David Hunter et.al, 1998, *International Environmental Law and Policy*, New York Foundation Press, page 1189 – 1190.

Marine Mammal Protection Act (Undang-undang Tentang Perlindungan Mamalia Laut) yang mengatur tentang standard perlindungan ikan dolphin bagi kapal pengangkap ikan Amerika dan bagi negara-negara yang kapal ikannya menangkap ikan Tuna di lautan Pasifik. Jika sebuah negara yang mengekspor ikan Tuna ke AS tidak dapat membuktikan kepada pihak otoritas AS yang tidak memenuhi standard yang diatur dalam US MMPA maka pihak pemerintah AS harus mengembargo semua import ikan Tuna tersebut dari negara yang bersangkutan. Dalam kasus ini, Meksiko adalah negara yang mengekspor ikan Tuna ke AS dan dilarang oleh pemerintah AS. Meksiko komplain ke GATT *Dispute Settlement Procedure*. Kasus ini pada akhirnya dimenangkan oleh Meksiko karena tindakan sepihak AS tersebut dinyatakan tidak memenuhi unsur "*necessary measure*" dalam Artikel XX GATT. Malah sebaliknya, pihak AS dianggap melakukan tindakan yang sewenang-wenang (*arbitrary*). Kasus-kasus lain yang berkaitan dengan tindakan unilateral dalam konteks Artikel XX adalah *Turtle Case*, *Clean Air Act Case*, dan *EU-Banana Case*.

Regulasi Teknis (*Technical Regulation*) lain yang relevan dengan *unilateral action* adalah Artikel XXI yang menyatakan :

- Nothing in this agreement shall be construed
- a) *To require any contracting party to furnish any information the disclosure of which it considers contrary to its essential security interests; or*
 - b) *To prevent any contracting party from taking any action which it consider necessary for the protection of its essential security interests*
 - (i) *Relating to fissionable materials or the materials from which they are derived;*
 - (ii) *Relating to the traffic in arms, ammunition and implements of war and to such traffic in other goods and materials as is carried on*

directly or indirectly for the purpose of supplying a military establishment;

(iii) *Taken in time of war or other emergency in international relations; or*

- c) *To prevent any contracting party from taking any action in pursuance of its obligations under the United Nations Charter for the maintenance of international peace and security*

Artikel XXI ini pada dasarnya membolehkan suatu negara melakukan tindakan embargo yang bersifat sepihak dengan alasan keamanan nasional (*national security grounds*). Kasus yang relevan adalah Undang-Undang AS tentang *Bioterrorism*. Nama lengkap UU tersebut adalah *Public Health Security and Bioterrorism Preparedness and Response Act of 2002* (dikenal *Bioterrorism Act*). Undang-undang tersebut telah menimbulkan kekawatiran di masyarakat, utamanya kalangan bisnis, mengingat berpotensi untuk menghambat ekspor produk bahan pangan Indonesia ke AS.

Bioterrorism Act ini memang dipertanyakan oleh para anggota WTO apakah dibenarkan menurut ketentuan WTO atau tidak ? Guna memenuhi ketentuan WTO bahwa semua aturan harus dinotifikasi, maka AS telah menyampaikan undang-undang tersebut kepada Komite *Sanitary and Phytosanitary (SPS)* dan Komite *Technical barrier to Trade (TBT)* WTO. Dalam kedua komite inilah terbuka kesempatan pembahasan oleh negara-negara anggota WTO terhadap legalitas/konsistensi undang-undang tersebut dengan ketentuan WTO. Jika para anggota WTO menganggap bahwa undang-undang AS tersebut bertentangan dengan ketentuan WTO maka dapat diperkarakan melalui prosedur penyelesaian sengketa WTO. Hal ini sangat tergantung pada apakah aturan AS tersebut dianggap sebagai suatu non-tariff barrier murni yang dilarang oleh WTO atau

diberikan pengecualian karena alasan keamanan atau perlindungan manusia, berdasarkan Artikel XX dan XXI GATT 1994.

Tindakan unilateral lain yang semi legal adalah *standarisasi* produk. Dalam perdagangan internasional, standarisasi ini dianggap sebagai hambatan non tarif (*non-tariff barrier*) yang berbeda dengan *technical regulation*. Standard produk lebih bersifat sukarela (*voluntary*) yang biasanya ditentukan oleh sebuah industri atau Badan Standarisasi Non Pemerintah (*Non-governmental Standardization Body*).¹⁶ Tidaklah mengherankan bila di negara-negara industri jumlah standarisasi melebihi dari jumlah regulasi teknis. Jenis hambatan lain adalah sistem sertifikasi (*certification*) yaitu mencakup prosedur-prosedur yang harus diikuti oleh produsen di mana produk-produk mereka atau proses produksinya haruslah sesuai dengan standard atau regulasi yang relevan.

Standarisasi dapat dianggap menghambat perdagangan. Bilamana hal ini terjadi, standard dianggap sebagai hambatan teknis di bidang perdagangan (*technical barrier to trade*). GATT memang tidak mengatur tentang standarisasi. *Agreement on Technical Barrier to Trade* bertujuan untuk menjamin bahwa regulasi teknis, standard, testing, dan sertifikasi produk (baik untuk alasan keselamatan, kesehatan, perlindungan lingkungan) tidak boleh menjadi hambatan terhadap perdagangan. Dalam persetujuan tersebut dinyatakan bahwa standarisasi tidak boleh menghambat perdagangan dan tidak boleh diskriminatif dan tidak boleh ada perlakuan beda antara produk domestik dengan produk import. Di samping itu, suatu negara yang menetapkan standarisasi terhadap produk asing harus memberitahukan sebelumnya (*prior notification*) dan harus menciptakan pusat komunikasi (*inquiry point*) serta menyediakan informasi tentang standard.

Dalam praktek, penerapan standarisasi terhadap produk Indonesia di luar negeri memang cukup menyulitkan karena standarisasi produk di negara-negara industri berbeda dengan standard yang diterapkan di negara sedang berkembang seperti Indonesia. Praktek-praktek tersebut dilakukan secara sepihak. Guna menghindari konflik standarisasi ini maka industri-industri di suatu negara mau tidak mau harus menyesuaikan standarisasi negara tujuan ekspor atau standarisasi menurut ISO (*International Organization for Standardization*) atau IEC (*International Electrotechnical Commission*). Selain itu, negara-negara anggota WTO didorong untuk menegosiasikan tentang persetujuan pengakuan bersama (*mutual recognition agreements*) berkaitan dengan masalah standarisasi tersebut sehingga diharapkan mampu mengurangi secara signifikan adanya tindakan unilateral dengan alasan tidak memenuhi standarisasi produk di negara tujuan ekspor.

Di bidang perdagangan jasa, khususnya sektor transportasi, tindakan unilateral juga telah terjadi pada sektor penerbangan sipil yang bersifat komersial. Transportasi dalam perdagangan internasional merupakan sektor yang diatur dalam perdagangan jasa yang bernama GATS (*General Agreement on Trade in Services*). Penyelenggaran perdagangan jasa menurut Pasal I ayat 2 GATS adalah sbb :

- a. jasa yang diberikan dari satu wilayah negara peserta ke wilayah negara peserta lainnya, misalnya jasa telekomunikasi
- b. jasa yang diberikan dalam satu wilayah negara kepada konsumen dari negara peserta lainnya, misalnya jasa pariwisata
- c. jasa yang diberikan melalui kehadiran badan usaha satu negara dalam wilayah negara lain, misalnya melalui pembukaan kantor cabang atau perwakilan bank asing
- d. jasa yang diberikan oleh warganegara satu

16 Misalnya American Standards Institute (ANSI), British Standards Institution (BSI), Deutsches Institut für Normung (DIN) dan Badan Standarisasi Nasional Indonesia.

negara peserta dalam wilayah negara peserta lainnya, misalnya melalui jasa konsultan atau akuntan.

GATS sendiri mengatur beberapa prinsip yang harus ditaati oleh negara anggota yaitu a) prinsip *Most Favoured Nations* (MFN) (Pasal II) di mana negara anggota tidak boleh melakukan diskriminasi antar pemasok jasa asing; b) Prinsip *transparansi* (Pasal III) : setiap negara peserta harus melakukan segala sesuatunya dengan terbuka dan mengadakan publikasi tentang tindakan-tindakan yang diadakannya yang bertalian atau dapat mempengaruhi berlakunya perjanjian ini. Selain kedua prinsip di atas terdapat pula prinsip-prinsip yang bersifat pembatasan yaitu prinsip *market access* dan *national treatment*.

Komitmen negara anggota berkaitan dengan akses pasar dan perlakuan nasional (*national treatment*) dalam penyelenggaraan perdagangan jasa harus dituangkan dalam *specific commitments*. *Specific commitment* berisi tentang sektor jasa yang bisa dimasuki pemasok jasa asing, pembatasan (*limitation*) akses pasar dan persyaratan-persyaratan yang disetujui dalam komitmen.

Sama dengan perdagangan barang GATT 1994 (Artikel XX dan XXI), di dalam perdagangan jasa (Artikel XIV GATS) ini juga dikenal *technical regulation* yang membolehkan suatu negara untuk melakukan *unilateral action* (tindakan sepihak) dalam rangka untuk melindungi moral publik atau untuk menjaga ketenteraman masyarakat, melindungi kehidupan manusia, hewan, tanaman atau kesehatan. Tindakan unilateral dengan alasan keamanan nasional juga diperbolehkan dalam GATS (Artikel XV).

Kasus yang menarik yang berhubungan dengan Indonesia adalah dilarangnya hak penerbangan oleh Uni Eropa terhadap pesawat udara sipil (penumpang) Indonesia dengan alasan standarisasi keselamatan transportasi.

Masalah standarisasi keselamatan penerbangan merupakan hambatan perdagangan jasa khususnya jasa angkutan udara. Masalah standarisasi keselamatan ini merupakan hal mendasar di mana negara pengguna jasa dapat melakukan tindakan sepihak dalam rangka melindungi kepentingan manusia. Namun demikian, tindakan sepihak tidak diperkenankan untuk menghambat perdagangan dan tidak boleh diskriminatif. Frekuensi kecelakaan pesawat udara komersial suatu negara akan memberikan dampak pada tindakan sepihak dari negara lain dengan mendasarkan pada "*scientific justification*". Tindakan sepihak ini juga harus dinotifikasikan kepada Dewan ICAO (*International Civil Aviation Organization*).

Upaya untuk melakukan negosiasi dalam rangka melakukan penyesuaian standarisasi keselamatan sangatlah penting. Oleh karena itu, pemenuhan standarisasi seperti yang telah ditentukan ICAO maupun IATA (*International Air Transportation Association*), melakukan *mutual recognition agreement* dengan negara-negara lain serta penegakan hukum disiplin keselamatan penerbangan pada tingkat nasional merupakan langkah yang perlu dilakukan.

Di bidang pariwisata, tindakan sepihak dapat dijumpai pada adanya "*travel warning*" dari pemerintah sebuah negara dikarenakan kondisi negara penyedia jasa berada dalam kondisi "membahayakan" bagi warganegara asing. Banyaknya kasus-kasus teror merupakan "lampu merah" bagi negara penyedia jasa pariwisata untuk menindak tegas para pelakunya. Sektor jasa pariwisata ini sangatlah penting karena akan mampu meningkatkan penerimaan devisa, memperluas kesempatan usaha/lapangan kerja, mampu mendorong pembangunan daerah dan pengembangan produk nasional serta memperkaya kebudayaan nasional.

Tindakan sepihak negara pengguna jasa pariwisata dalam rangka melindungi warganegara sebagai konsumen jasa pariwisata merupakan tanggung jawab negara. Dalam hukum internasional dikenal bahwa negara harus bertanggung jawab terhadap warganegara ke mana mereka berada. Demikian pula sebaliknya, negara di mana warganegara asing tersebut berada wajib memperlakukan warganegara asing tersebut sama dengan warganegaranya sendiri. Dalam hukum internasional dikenal dengan istilah "standard minimum hukum internasional".

Kecenderungan Membentuk Hukum Baru (Law Making)

Dari praktek tindakan sepihak yang dilakukan oleh negara sebagian besar berlatar belakang kepentingan ekonomi dan politik. Di bidang HAM dan demokrasi misalnya ada upaya-upaya dari negara-negara maju untuk mencoba keluar dari aturan-aturan hukum internasional yang konvensional. Upaya tersebut dapat dilihat adanya tekanan-tekanan terhadap NSB untuk melakukan perbaikan-perbaikan baik di bidang politik, ekonomi dan hukum.

Justifikasi doktrin *pre-emptive* yang dikembangkan dan dipraktekan oleh AS dan koleganya (Inggris, Australia) yang dikaitkan dengan HAM dan demokrasi sangatlah membahayakan posisi NSB. Kalau kita bandingkan beberapa kasus yang terjadi baik di Irak, Afganistan, Sudan (Kasus Dafur) maka semua tindakan sepihak tersebut dilakukan oleh mereka yang memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam percaturan internasional. Hukum internasional dalam hal ini hanya dijadikan sebagai instrumen politik bagi mereka. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah doktrin *pre-emptive* ini akan menjadi ketentuan hukum internasional yang baru. Sementara ketentuan hukum internasional yang lama menyatakan apapun alasannya suatu negara tidak

diperbolehkan mencampuri urusan dalam negeri negara lain kecuali atas wewenang PBB dalam rangkan mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional. Bagi negara yang melanggar ketentuan tersebut sudah tentu dianggap melakukan intervensi.

Penghormatan terhadap HAM dan demokrasi patutlah kita hargai namun tekanan-tekanan sepihak yang dilakukan oleh negara-negara maju terhadap NSB adalah tidak adil karena berada pada posisi yang tidak imbang. Ketidakadilan struktural sesungguhnya tidak hanya semata-mata dikarenakan kondisi internal negara itu sendiri tetapi juga adanya kontribusi dari negara-negara maju. Keadilan barat lebih menekankan pada *rule of law* yaitu keadilan yang lebih mengutamakan keadilan individual. Sebaliknya, bagi NSB seperti Indonesia keadilan komunal lebih diutamakan. Oleh karena itu, sesungguhnya konflik-konflik yang terjadi lebih disebabkan adanya ketidakadilan struktural. Demikian pula di bidang ekonomi, tidaklah mungkin NSB bersaing dengan negara maju. Sementara negara maju sudah memasuki perdagangan jasa (*service*), NSB masih berkuat pada perdagangan barang (*goods*).

Kecenderungan tindakan unilateral akan masih terus terjadi bahkan kemungkinan bisa dijadikan sebagai hukum kebiasaan internasional melalui praktek-praktek yang dilakukan oleh sebagian besar negara-negara maju. Hukum internasional tradisional mampu memecahkan masalah tersebut karena hukum internasional bersifat mendua (*ambiguous*). Terhadap negara-negara yang lemah hukum internasional nampak efektif namun sebaliknya terhadap pelanggaran hukum internasional yang dilakukan negara-negara maju seperti AS, hukum internasional terasa tidak berdaya. Bahkan upaya-upaya untuk mengibiri Statuta Roma 1998 yang bertujuan untuk mengadili pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan juga telah terjadi seperti munculnya *Non-Surrender*

Agreement. Beranikah pemerintah Indonesia menolaknya?

Di bidang perdagangan, penerapan Pasal XX (perlindungan kesehatan manusia, hewan dan tanaman) dan XXI (alasan keamanan nasional) GATT sering diterapkan oleh negara maju. Kasus-kasus yang muncul lebih didasari pada tindakan sewenang-wenang (*arbitratry*) karena bersifat sepihak. Memang perlu diakui ada fasilitas-fasilitas yang diberikan negara maju kepada NSB seperti fasilitas GSP (*Generalized System of Preferences*)¹⁷ namun itu pun dilakukan atas dasar timbal balik.

Dengan demikian kalau kita melihat kondisi dan mendasarkan pada analisa tersebut di atas maka tantangan yang dihadapi pemerintah Indonesia semakin berat. Hal itu dikarenakan faktor : 1) globalisasi dan liberalisasi perdagangan; 2) ketergantungan kita terhadap negara maju masih cukup tinggi; 3) kemajuan teknologi informasi yang semakin canggih; 4) terorisme; 5) HAM dan demokrasi. Kondisi tersebut diperparah dengan kondisi dalam negeri yang masih amburadul seperti penegakan hukum, korupsi merajalela, kepentingan politik yang bersifat pragmatis ditambah kondisi ekonomi yang belum mampu mensejahterakan rakyat serta pembangunan karakter bangsa yang belum nampak hasilnya.

Untuk menghadapi berbagai persoalan tersebut, perlu dilakukan langkah-langkah strategis sbb :

1. mengurangi ketergantungan kepada negara maju baik kepentingan ekonomi maupun politik
2. menciptakan kesejahteraan rakyat dengan membuka lapangan kerja dengan mengundang investor asing
3. melakukan pembenahan birokrasi
4. melakukan efisiensi ekonomi

5. penegakan hukum (*law enforcement*) termasuk pemberantasan tindak kejahatan korupsi
6. upaya-upaya diplomatik baik melalui organisasi regional seperti ASEAN maupun organisasi internasional untuk mengantisipasi upaya-upaya justifikasi terhadap tindakan sepihak negara-negara maju.

Kesimpulan

1. ketentuan hukum internasional yang ada dalam perkembangannya sudah tidak mampu mengantisipasi tindakan-tindakan sepihak yang dilakukan oleh negara-negara maju khususnya dalam bidang HAM dan demokrasi.
2. upaya justifikasi dan legitimasi unilateralisme baik melalui tindakan langsung maupun melalui jalur akademik melalui beberapa karya-karya tulisan telah dilakukan oleh negara-negara maju dalam upaya untuk membentuk sebuah ketentuan hukum internasional baru.
3. tindakan unilateral diterapkan pula dalam dunia perdagangan terbukti banyaknya kasus-kasus yang dibawa ke *Dispute Settlement Body* WTO.
4. kondisi struktural yang tidak imbang antara negara maju dengan NSB menyebabkan NSB seperti Indonesia berada pada posisi tawar yang rendah.

¹⁷ GSP adalah suatu sistem preferensi yang diberikan oleh negara-negara maju kepada produk-produk tertentu yang berasal dari NSB yang memenuhi syarat-syarat dalam bentuk pemberian konsesi penurunan atau pembebasan tarif bea masuk untuk membantu pembangunan NSB melalui antara lain : meningkatkan pendapatan devisa dan mempercepat industrialisasi.

Daftar Pustaka

- Chand, Hari, 1994, *Modern Jurisprudence*, Kuala Lumpur, International Law Book Services.
- Hikmahanto Juwana, *Hukum Internasional Dalam Perspektif Negara Sedang Berkembang, Pengembangan Bahan Ajar Hukum Internasional, Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Semarang, 6-8 Juni 2006.
- Hoekman, Bernard, Sauve, Pierre, *Liberalizing Trade in Services*, The World Bank, Washington DC.
- Hunter, David et.al, 1998, *International Environmental Law and Policy*, New York: Foundation Press.
- I Wayan Parthiana, 1990, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Penerbit CV Mandar Maju.
- ICJ Reports 1974, Putusan Tanggal 20 Desember 1974.
- International Law Commission, *Second Report on Unilateral Acts of States*, General Assembly, 14 April 1999, Geneva 3 May – 23 July 1999.
- Teson, A *Philosophy of International Law*, New York Press.
- Theo Huijbers, 1982, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Pustaka Filsafat.
- Saduska, Romana, "Australia-dispute : capacity on the Pacific Routes", *Air Law*, Volume XIII, number 2, 1988. US aviation.
- Rome Statute 1998 on International Criminal Court.
- UN Charter 1945 (Piagam PBB).
- Uruguay Round of Multilateral Trade Agreements (Marrakesh Agreement) 1994.